

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Modal sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan pertanian melalui agribisnis, terutama dalam kaitannya dengan perbaikan struktur ekonomi masyarakat pasca krisis ekonomi sudah saatnya diimplementasikan dalam kegiatan riil ditingkat petani namun para pelaku agribisnis lainnya secara komprehensif menurut Sutarto, dkk (2008:234).

Untuk mendirikan koperasi diperlukan tingkat manajemen pengelolaan sangat besar supaya perkembangan koperasi bisa cepat berkembang. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata (Robbins dan Coulter, 2004 : 1).

Hal ini cukup beralasan bahwa selama krisis ekonomi beberapa waktu lalu, sektor pertanian khususnya kegiatan agribisnis telah mampu bertahan dengan pertumbuhan yang positif. Namun tersebut secara faktual belum diikuti perbaikan ekonomi bagi pelaku agribisnis didalamnya maupun pelaku kegiatan pertanian secara keseluruhan. Nilai tukar petani yang terkait dengan beberapa komoditas yang dihasilkan tetap berada pada tingkat harga yang rendah (Saragih, 1995; Sapuan, 1996).

Pembuatan kebijakan ditingkat makro belum sepenuhnya menjabarkan tentang arti dari pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang positif tersebut dalam bentuk tingkat riil yang memberikan perubahan positif bagi pelaku usaha pertanian di tingkat produsen. Pertumbuhan positif sektor pertanian yang cukup membanggakan oleh para petinggi disektor pertanian belum menjadi kebanggaan nyata ditingkat petani. Tingkat kesejahteraan petani terus menurun sejalan dengan persoalan-persoalan klasik didalamnya, sekaligus menjadi bagian dan dilema dari sebuah kegiatan agribisnis ditingkat produsen pertanian. Tingkat keuntungan

kegiatan agribisnis selama ini lebih banyak dinikmati pedagang dan pelaku agribisnis lain di hilir (Arifin, 2001; Sumodiningrat, 2002:34).

Modal merupakan kendala yang selalu dikeluhkan para petani karena dengan modal petani bisa menggarap perkebunan dan sawah mereka, beberapa lembaga banyak didatangi oleh petani untuk mencari pinjaman modal, lembaga yang sering didatangi petani salah satunya yaitu koperasi. Koperasi adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan ditentukan suku bunga sesuai pendapatan petani itu sendiri. Upaya peningkatan produksi dan pendapatan sering menghadapi kendala karena terbatasnya sumber modal yang mudah, cepat dan murah. Petani yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal sering mengaksesnya melalui tengkulak atau penyedia modal yang berada di sentra produksi. Keterikatan petani dengan tengkulak berlanjut terus sampai pada penjualan hasil panen, dimana hutang dibayar dengan hasil padi atau disebut sistem *yarnen*. Bila diperhitungkan, harga pupuk lebih tinggi yang mengakibatkan tingginya biaya modal yang menjadi beban petani (Afriyatna *et.al.*, 2011:21).

Sebagai daerah berkembang, saat ini Provinsi Gorontalo harus mulai bisa menentukan sektor riil pengembangan agribisnis dengan cara menentukan terminal agribisnis yang ada dan tetap di Provinsi Gorontalo. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengembangan tata ruang wilayah. Penentuan sektor-sektor dan subsektor terminal agribisnis, pemerintah provinsi akan lebih mudah menentukan strategi dan kebijakan apa yang tepat untuk dikembangkan di masing-masing wilayah, juga para Bupati dan Walikota mampu menjabarkan kebijakan pembangunan provinsi tersebut secara ideal sesuai dengan potensi kewilayahan yang dimiliki. Pembangunan kawasan sentra industri dan terminal agribisnis sangat membantu dalam mengembangkan pertanian yang ada di Gorontalo.

Kabupaten Boalemo merupakan Kabupaten yang rata-rata masyarakatnya berpenghasilan dari pertanian yang meliputi, hultikutura, perkebunan dan peternakan, yang memiliki potensi pendapatan perekonomian bisa lebih baik dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Gorontalo. Tetapi

kurangnya sarana prasana dalam kehidupan masyarakat Boalemo sehingga penjualan hasil panen yang didapatnya hanya terjual didalam daerah saja, sehinggga pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak sebegitu menguntungkan bahkan dapat mengalami kerugian. Kurangnya informasi harga dan pedagang yang akan membeli hasil pertanian mereka, masyarakat hanya menjualnya kepedagang setempat dengan pengambilan hasil pertanian dihargai tidak sebanding dengan pengeluaran petani dan ini hanya akan menguntungkan pedagang itu sendiri, dengan ini yang menyebabkan masyarakat Boalemo memiliki perekonomian dibawah rata-rata dibandingkan didaerah kabupaten lainnya.

Dalam meningkatkan pendapatan petani diberbagai bidang hultikultura, peternakan dan pelaku agribisnis lainnya, dibangunnya koperasi pertanian KSU di Desa Harapan Kecamatan Wonosari bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Wonosari khususnya di Desa Harapan akan meningkat, dengan ini sentra penjualan hasil pertanian masyarakat lebih mudah dan harganya juga sesuai ketentuan yang diberikan pemerintah untuk satuan harga produk pertanian.

Dibangunnya koperasi pertanian dibutuhkan tenaga yang handal dalam mengelolah dan mengatur jalanya kegiatan yang ada didalam koperasi pertanian, dengan ini diharapkan koperasi pertanian yang ada di Desa Harapan bisa lebih maju dan berkembang. Manajemen pengelolaan koperasi KSU di Desa Harapan kurang berkembang karena karyawan yang mengelola koperasi dilatarbelakangi dengan pendidikan relatif rendah serta kurangnya pengalaman mengenai pengelolaan manajemen koperasi, disamping itu koperasi KSU masih baru berdiri.

Adanya koperasi KSU masyarakat akan lebih mudah mencari modal untuk menggarap dan mengelolah hasil pertanian mereka dengan ini petani tidak lagi meminjam kepada rentenir dengan pengembalian bunga yang sangat tinggi yang bisa merugikan petani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah bagaimana manajemen koperasi KSU Makmur Bersama Kapet di Desa Harapan Kecamatan Wonosari?

C. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen koperasi KSU Bersama Kapet di Desa Harapan Kecamatan Wonosari.

D. Manfaat

1. Bagi koperasi KSU Bersama Kapet, semoga menjadi bahan acuan pengembangan koperasi dan dapat memberikan tambahan SDM yang handal dalam menyikapi kemungkinan timbulnya permasalahan, serta dalam pengambilan keputusan pengembangan koperasi KSU Makmur Bersama Kapet di Desa Harapan.
2. Bagi pemerintah dapat menjadi tambahan masukan dalam melengkapi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan sektor agribisnis dalam mengembangkan koperasi pertanian.
3. Bagi peneliti, ini sebagai langkah awal dalam penerapan ilmu pengetahuan dan sebagai pengalaman yang dapat dijadikan referensi, mengingat keterbatasan dalam penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.